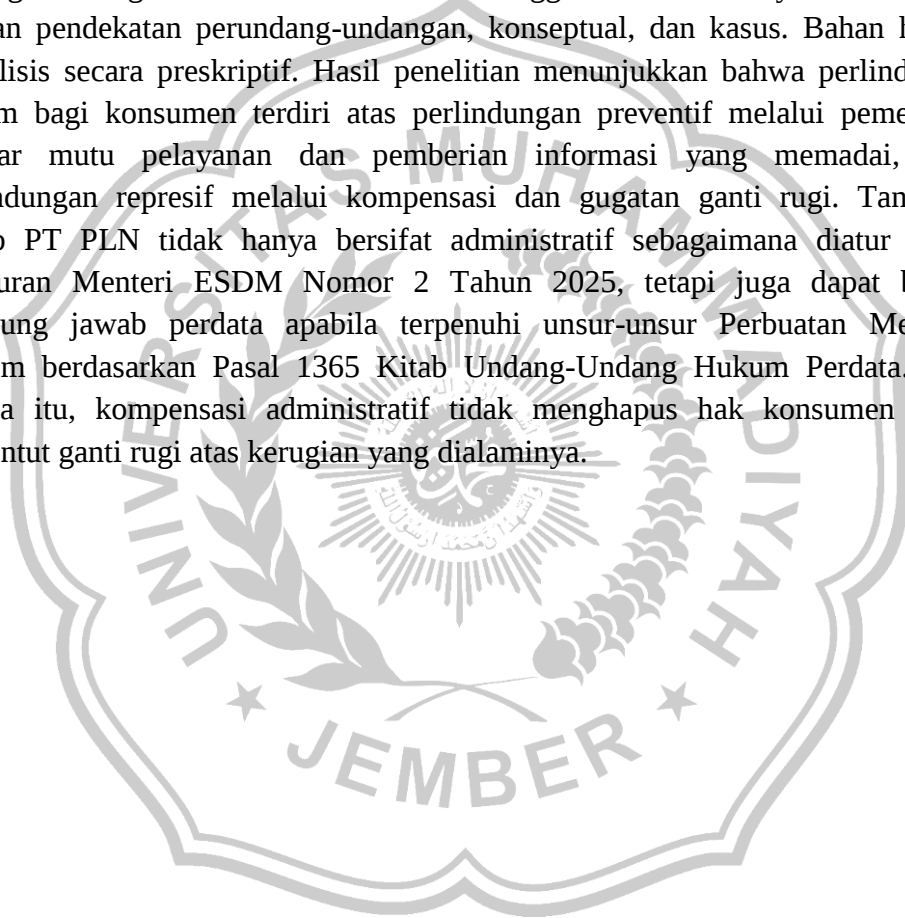


ABSTRAK

Pemadaman listrik massal di Provinsi Aceh pada akhir September hingga awal Oktober 2025 mengakibatkan berbagai kerugian bagi masyarakat, baik kerugian materiil maupun terganggunya aktivitas ekonomi. Peristiwa tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab PT PLN sebagai penyedia tenaga listrik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pemadaman listrik massal di Aceh Tahun 2025 serta menganalisis tanggung jawab PT PLN berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terdiri atas perlindungan preventif melalui pemenuhan standar mutu pelayanan dan pemberian informasi yang memadai, serta perlindungan represif melalui kompensasi dan gugatan ganti rugi. Tanggung jawab PT PLN tidak hanya bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab perdata apabila terpenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, kompensasi administratif tidak menghapus hak konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.



ABSTRACT

The mass power outage that occurred in Aceh Province between late September and early October 2025 caused significant economic losses and disrupted various community activities. This incident raised legal issues concerning consumer protection and the liability of PT PLN as the national electricity provider. This study aims to analyze the legal protection available to consumers affected by the 2025 Aceh power outage and to examine PT PLN's liability under Articles 28 and 29 of Law Number 30 of 2009 on Electricity. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed using a prescriptive approach. The findings indicate that consumer protection consists of preventive measures through compliance with service quality standards and adequate information disclosure, as well as repressive measures through compensation and civil claims for damages. PT PLN's liability is not limited to administrative compensation under the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 2 of 2025 but may also extend to civil liability when the elements of an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code are fulfilled. Therefore, administrative compensation does not eliminate consumers' right to seek full compensation for the losses they have suffered.

Keywords: consumer protection, power outage, PT PLN, unlawful act, electricity law.

